

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran

Menurut H. Muindro Renyowijoyo, Rencana pengeluaran, rencana penerimaan, atau pengeluaran pembiayaan yang mencakup periode waktu tertentu, hal tersebut bagian termasuk dalam anggaran (Renyowijoyo, 2013). Prosedur penyusunan anggaran biasa disebut dengan penganggaran, sedangkan anggaran itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang merujuk pada kinerja yang hendak dicapai selama waktu yang ditetapkan yang disajikan dalam ukuran finansial. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan peninjauan kembali merupakan aspek-aspek yang berkesinambungan dalam penganggaran. Prosedur ini disebut dengan siklus anggaran. (Mardiasmo, 2018).

Komponen penting dari teknik manajemen organisasi adalah perencanaan. Selain itu, anggaran memiliki tempat yang signifikan. Anggaran memperjelas apa yang akan dilakukan nantinya. Manajemen organisasi mana pun mempertimbangkan untuk mengintegrasikan aktivitas menuju tujuan perusahaan melalui proses yang dikenal sebagai pemikiran strategis. Manajemen akan terdorong untuk menyusun strategi lebih banyak ketika pasar eksternal, lingkungan teknologi, dan iklim ekonomi lebih dinamis. Dokumen perencanaan berfungsi sebagai catatan pemikiran strategis manajemen. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada orang atau organisasi tertentu (Nasution et al., 2023).

Teknik penganggaran yang dikenal sebagai penganggaran berbasis kinerja memungkinkan manajemen untuk menghubungkan setiap pengeluaran yang dibelanjakan untuk suatu prosedur dengan keluaran dan gapaian yang dikehendaki, mencakup efisiensi dengan harap menghasilkan tujuan-tujuan yang diinginkan. Merencanakan anggaran adalah proses yang sangat kompleks dengan banyak kompleksitas politik di perusahaan sektor publik. Proses penganggaran bersifat politis dalam organisasi sektor publik. Tidak seperti di sektor swasta, di mana penganggaran tidak terlalu menimbulkan nuansa politis, hal ini sangat berbeda. Publik tidak diperbolehkan mengakses rahasia perusahaan, termasuk anggaran, namun terbuka untuk perdebatan, kritik dan saran. Administrasi uang publik dan pelaksanaan inisiatif

yang didanai oleh uang publik dipertanggungjawabkan melalui anggaran sektor publik (Halim & Iqbal, 2019).

Ada empat langkah dalam siklus anggaran: persiapan anggaran, persetujuan/ratifikasi, implementasi, dan pelaporan dan penilaian. Rencana kegiatan dimasukkan ke dalam anggaran publik dan ditampilkan sebagai strategi untuk menghasilkan pendapatan dan membelanjakan uang. Anggaran publik, dalam bentuknya yang paling dasar, adalah laporan yang merinci pendapatan, biaya yang dikeluarkan, dan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan keuangannya. Perkiraan kegiatan organisasi di masa mendatang juga termasuk dalam anggaran. Semua anggaran memberikan rincian rencana organisasi untuk tahun-tahun mendatang (Hantono et al., 2021).

Berbagai manajer, baik manajer dengan posisi tertinggi maupun manajer dengan posisi yang lebih rendah, terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Jika para manajer bertanggung jawab atas kinerja mereka melalui anggaran, mereka akan bertanggung jawab untuk membuat dan menilai banyak alternatif tujuan anggaran. Pada dasarnya, ada dua jenis penganggaran: penganggaran dari atas ke bawah (*top-down*), yang dapat dibuat tanpa banyak masukan dari bawahan, dan penganggaran partisipatif (*bottom-up*), yang dibuat dengan memperoleh menyempatkan kepada para manajer pada tingkat yang lebih rendah untuk terlibat dalam perumusan anggaran. Perencanaan yang matang diperlukan saat membuat anggaran organisasi. Perlu adanya tolok ukur kinerja dalam anggaran yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan anggaran menguraikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menggapai misi yang telah diterima dan hasil yang diinginkan.

Singkatnya, anggaran adalah rencana metodis organisasi untuk mengelola keuangannya yang mencakup proyeksi pendapatan dan prediksi pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa anggaran memiliki beberapa karakteristik, seperti (Bastian, 2010):

- a. Satuan keuangan dan non-keuangan digunakan oleh anggaran.
- b. Anggaran sering kali mencakup berbagai periode waktu, seperti satu tahun atau lebih.
- c. Janji manajemen, atau kapasitas, untuk memenuhi tujuan tercermin dalam anggaran.

d. Otoritas yang lebih tinggi telah mengesahkan anggaran yang diusulkan dibandingkan dengan penyusunan anggaran.

e. Anggaran hanya dapat diubah dalam keadaan tertentu setelah disusun.

2. Konsep Islam Tentang Anggaran

Surah An-Nahl ayat 90 mengkaji tentang anggaran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Menurut ayat di atas, Allah Ta’ala meminta umat-Nya untuk mempraktikkan keadilan, yaitu memiliki pendekatan yang moderat dan seimbang, dan Dia juga menyarankan untuk berbuat baik. Jika berkaitan dengan anggaran, maka anggaran tersebut harus disusun secara adil, tanpa memihak kepada salah satu pihak, untuk memastikan tidak ada yang dirugikan.

Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ ۖ بِالنَّفْسِ ط ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ط ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Dalam ayat di atas Allah mengatakan bahwa agar senantiasa menjadi penegak kebenaran dalam Islam. Bahasan dari arti ayat di atas dapat di definisikan untuk kaum muslimin senantiasa menjadi sebagai penegak dan pendorong kebenaran karena Allah SWT. tidak karena makhluk lain atau tidak karena mendapatkan popularitas, dan kaum muslimin harus senantiasa adil, menguntungkan segala pihak. Penjelasan kata secara

adil ini, bukan secara curang. Penjelasan dari pandangan tersebut adalah, tidak seharusnya kebencian kepada suatu kaum menjadi sebab suatu kaum lagi mengerjakan ketidakadilan kepada mereka, lain daripada itu kerjakanlah keadilan itu kepada semua orang, sebagaimana sahaba ataupun musuh dari padamu. Terkait hal tersebut Allah berkata bahwa keadilan sengat diutamakan dengan dekat dengan ketakwaan. Penjelasan dari kalimat tersebut bahwa, keadilan itu membawa kita kepada takwa daripada menjauhkan diri pada ketakwaan kepada Allah. Pernyataan ini berarti bahwa Anda akan mendapatkan ganjaran dari Allah tergantung pada pengetahuan-Nya tentang perbuatan Anda; jika perbuatan Anda sangat baik, Anda akan menerima ganjaran yang baik, dan jika perbuatan Anda jahat, Anda akan menerima ganjaran yang buruk juga.

Anda harus mempertahankan kebenaran karena Allah semata, menurut surah dari Allah ini. Penafsiran ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk berperilaku adil dan konsisten dalam menjunjung tinggi akan kebenaran dalam segala situasi. Hal ini juga berlaku untuk perencanaan anggaran. Penting untuk membuat anggaran dengan jujur demi kemaslahatan semua golongan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara individu dan komunitas yang lebih besar.

3. Urgensi Anggaran Sektor Publik

Urgensi terletak pada kemampuan anggaran tersebut untuk menaksir sejauh mana kebutuhan masyarakat terkait anggaran sektor publik. Anggaran didefinisikan sebagai media kebijakan fiskal yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pajak dan pengeluaran yang negatif terhadap kondisi perekonomian. Pemerintah dapat mendistribusikan kepemilikan yang terbatas melalui anggaran untuk menggalakkan pembangunan sosial dan mengembangkan standar hidup. (Yuesti et al., 2021).

Anggaran sektor publik tidak menyentuh seluruh faktor kehidupan, dan tidak pula menangani seluruh aspek permasalahan di tingkat lokal atau nasional. Sasaran anggaran sektor publik, mencakup air bersih, listrik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya dimaksudkan untuk memastikan sejauh mana keperluan dasar dapat disediakan secara memadai. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, anggaran menjabarkan rencana pembelanjaan pemerintah atas dana publik dan berfungsi sebagai representasi kepentingan rakyat. Anggaran berfungsi sebagai peta jalan bagi masa depan bangsa dan sebagai fondasi bangsa. Anggaran sektor publik sangat menentukan karena beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Pemerintah mempergunakan alat untuk memastikan sebagai mengatur kesinambungan, memandu pertumbuhan sosial ekonomi, dan meningkatkan standar hidup masyarakat.
- b. Sumber daya yang terbatas dan tuntutan serta keinginan masyarakat yang terus berkembang, anggaran menjadi sangat penting. Keperluan anggaran karena adanya kondisi dimana sumber daya yang sangat kurang dan terbatas (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*), dan *trade offs*.
- c. Anggaran publik berfungsi sebagai penilaian yang dapat digunakan oleh lembaga publik yang telah ada untuk mencapai pertanggungjawaban publik (Pongtasik & Ronal, 2023).

4. Fungsi Anggaran

Fungsi dan kegunaan penggunaan dari anggaran sektor publik (Yuesti et al., 2021), yaitu:

a. Anggaran dalam Perencanaan

Dalam rangka menyelesaikan tujuan perusahaan, anggaran adalah instrumen untuk perencanaan manajemen. Anggaran dimanfaatkan sebagai alat perencanaan untuk mengantisipasi langkah-langkah yang bisa diambil pemerintah, pengeluaran yang diinginkan, dan hasil dari tindakan tersebut. Salah satu fungsi media prosedur mempersiapkannya adalah sebagai:

- 1) Memformulasikan peran dan target peraturan yang setara dengan penegasan visi dan misi;
- 2) Menyiapkan berbagai inisiatif dan prakarsa untuk menggapai wujud instansi dan melakukan sumber opsi keuangan pemerintah;
- 3) Menyediakan sumber untuk berbagai prosedur dan aktivitas yang sudah ditetapkan;
- 4) Menetapkan tingkat penilai untuk mengukur dan tingkat pertumbuhan prosedurnya.

b. Anggaran dalam media Pengendalian

Pemerintah tidak dapat mengontrol pengeluaran yang tidak semestinya dengan mekanisme kontrol yang ada saat ini. Pemakaian yang berlebihan, pemakaian yang kurang, dan penggunaan uang yang tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna, semuanya dapat dicegah dengan menggunakan anggaran sebagai alat manajemen.

Para eksekutif yang bertanggung jawab kepada publik dapat diarahkan oleh anggaran sektor publik.

c. Anggaran sebagai media Kebijakan Fiskal

Mendorong pertumbuhan dan menstabilkan ekonomi adalah tujuan kebijakan fiskal pemerintah, yang mencakup anggaran. Perkiraan dan proyeksi ekonomi dapat dibuat dengan menggunakan anggaran publik untuk menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah.

d. Anggaran berperan dalam media Politik

Anggaran adalah dokumen politik yang dibutuhkan di sektor publik yang menunjukkan kesepakatan legislatif dan janji-janji eksekutif untuk pemakaian uang publik.

e. Anggaran dalam media Kordinasi dan Komunikasi

Ketidakkonsistenan dalam pencapaian tujuan organisasi suatu unit kerja dapat diidentifikasi melalui anggaran publik yang disusun dengan baik.

f. Anggaran dalam Penilaian Kinerja

Ketercapaian tujuan keuangan dan efektivitas penyelenggaraan anggaran akan menjadi dasar dalam menilai kinerja eksekutif. Pencapaian seorang manajer publik terhadap anggaran yang telah disepakati akan menjadi pertimbangan dalam menilai kinerjanya.

g. Anggaran berperan dalam Motivasi

Motivasi kerja pada dasarnya merupakan aspek eksternal yang memiliki pengaruh terhadap motivasi dan kemampuan kerja seseorang, sedangkan kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk menggapai sarannya dapat didefinisikan sebagai motivasi kerja (Syarvina & Fani, 2023). Manajer dan karyawannya dapat dianjurkan untuk bekerja secara murah, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan anggaran sebagai alat bantu. Dorongan yang dimulai dari jiwa untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai disebut dengan motivasi. (Kusmilawaty & Syabri, 2022).

h. Anggaran media untuk menciptakan Ruang Publik

Keterlibatan dalam proses penyajian anggaran sektor publik harus berasal dari masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat lainnya. Organisasi masyarakat yang terorganisir akan berupaya membawa dampak anggaran pemerintah demi urgensi masing-masing.

5. Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan/atau organisasi publik dalam proses pembentukan anggaran, dengan mempertimbangkan pentingnya peran dan fungsi anggaran dalam sektor publik. Berikut ini adalah prinsip panduan penyusunan anggaran sektor publik:

a. Prinsip Otorisasi Oleh legislatif

Legislatif wajib menyediakan kesepakatannya sebelum pemerintah dapat mengeluarkan permintaan anggaran publik untuk pelaksanaan pemerintahan.

b. Prinsip Komprehensif

Penyusunan dikelompokkan ke dalam anggaran termasuk seluruh penerimaan dan pengeluaran. Maka dari itu, keberadaan dana *non-budgetir* secara *inheren* bertentangan dengan prinsip kelengkapan anggaran.

c. Prinsip Keutuhan Anggaran

Dana umum keseluruhan pendapatan dan pengeluaran pemerintah kota harus ditempatkan ke dalamnya.

d. Prinsip *Nondiscretionary Appropriation*

Dana yang disalurkan oleh legislatif harus dibelanjakan secara bijaksana, ekonomis, dan efisien.

e. Prinsip Periodik

Anggaran yang disiapkan wajib bersifat periodik, baik tahunan ataupun multi tahunan, agar proses penganggaran menjadi periodik.

f. Prinsip Akurat

Cadangan terpendam tidak boleh dimasukkan dalam perkiraan anggaran karena dapat menjadi sumber penghamburan dan inefisiensi yang mengakibatkan pengeluaran yang terlalu besar dan jumlah pendapatan yang terlalu kecil.

g. Prinsip Jelas

pengeluaran yang telah disiapkan harus dipublikasikan dengan cara yang mudah dipahami tanpa ambiguitas. Transparansi publik dapat berupa transparansi anggaran.

h. Prinsip Diketahui Publik

Masyarakat umum harus mengetahui anggaran yang dibuat untuk tahun berjalan sehingga mereka mengetahui dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu (Hantono et al., 2021).

6. Prinsip Anggaran Dalam Perspektif Islam

Untuk membangun transparansi anggaran, pertimbangan harus diberikan pada prinsip-prinsip panduan anggaran selama pelaksanaannya. Dalam Al-Quran mengandung pengertian transparansi keuangan, Asy Syura Ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Penjelasan yang merujuk pada Rasul-Nya, menuruti segala perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. Melaksanakan salat didefinisikan sebagai ibadah yang mempunyai tingkat teratas kepada Allah. Penjelasan dari kalimat memutuskan segala perkara dengan musyawarah bahwa, manusia yang tidak menjalankan pekerjaan mereka sampai bermusyawarah (keputusan bersama) dengan upaya untuk mereka mendukung opini dengan jawaban masing-masing, seperti dalam peperangan dan pekerjaan yang sama dengan hal tersebut. Hal tersebut dilaksanakan seperti melakukan kebaikan kepada para muslimin, dari mulai keluarga dan orang-orang terdekat setelahnya.

Pengambilan keputusan bersama pada kalimat di atas menyiratkan bahwa pengumuman dan pelaporan anggaran kepada publik harus dilakukan. Kata amanah mengacu pada janji untuk membagi dan mendistribusikan dana sesuai dengan peruntukannya. Anggaran harus dikelola dengan jujur agar dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kinerja Sektor Publik

1. Pengertian Kinerja

Seluruh entitas sektor publik memiliki tujuan untuk menciptakan akuntabilitas setelah efektivitas dan efisiensi tercapai. Kinerja keuangan adalah evaluasi atas aktivitas entitas untuk menentukan seberapa baik entitas tersebut telah melaksanakan pekerjaannya dan mengevaluasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku umum (Baviga, 2021).

implementasi dari visi, misi, dan rencana penting agar hasil yang ingin dicapai dapat tercapai yaitu defenisi dari penganggaran kinerja. Elemen-elemen penganggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya, dan pengukuran kinerja untuk menganalisis *input*, *output*, dan *outcome* (Amanda, 2021). Tanpa tujuan atau target, tidak ada tolok ukur, sehingga tidak mungkin untuk menilai kinerja individu atau organisasi (Mahsun, 2009).

Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka kinerja dijalankan dengan baik. Kinerja dianggap sangat baik jika pencapaiannya melebihi, begitu juga sebaliknya (Harmain et al., 2020).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan strategi yang menghubungkan alokasi anggaran dengan hasil melalui tiga tahap, yaitu perencanaan eksekusi langsung, eksekusi informasi perencanaan, dan perencanaan persentase (Ritonga & Nurlaila, 2023).

Efektivitas merupakan parameter yang dipergunakan untuk menilai apakah organisasi berhasil menjalankan tujuannya atau tidak. Keterkaitan antara *output* dan tujuan dikenal sebagai efektivitas; lebih banyak kontribusi organisasi, program, atau kegiatan mengenai berhasilnya suatu tujuan, maka semakin berhasil instansi, prosedur, atau kegiatan tersebut (Mahmudi, 2016). Anggaran Pemda dikategorikan efektif bila mencapai target yang telah diputuskan.

Efektivitas organisasi didefinisikan sebagai indikator untuk mengukur seberapa baik atau buruk kinerja organisasi dalam menyelesaikan sasarannya. Analisis efektivitas dalam penelitian ini menjelaskan tentang kesanggupan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan dalam menggapai tujuan yang telah ditentukan dengan tetap berpedoman pada anggaran belanja yang telah diperkirakan. Rasio yang menghubungkan antara realisasi total pengeluaran dengan tujuan total pengeluaran dapat menggambarkan seberapa efektif suatu pengeluaran. Ada dua jenis pengeluaran yang membentuk total pengeluaran: langsung dan tidak langsung. Belanja yang terkait langsung dengan pemenuhan kegiatan defenisi dari Belanja langsung, seperti belanja modal untuk mendukung penyediaan layanan publik, belanja pegawai langsung (gaji dan honor), dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja pegawai tidak langsung (tunjangan) adalah belanja yang tidak berhubungan langsung dengan implementasi kegiatan.

Perwujudan pelayanan publik dijalankan dengan sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah yang dijalankan sebagai indikator penilaian akuntabilitas dan

efektivitas yang terkait pada anggaran (Kamilah & Fikri, 2023). Sebagai penilaian efektivitas tersebut tidak menilai besarnya uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan tujuan sasaran anggaran tersebut (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Menurut Mardiasmo bahwa tujuan penilaian kinerja sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berperan dalam meningkatkan dengan lebih efisien dalam media komunikasi (*top down and bottom up*).
- b. Penerapan dalam meningkatkan pencapaian strategi menilai kinerja finansial dan non finansial secara seimbang antara kedua.
- c. Memberikan motivasi dan dalam menyelesaikan sasaran yang sudah disusun sedemikian rupa mencapai *goal congruence* sebagai media untuk pemaparan urgensinya manajer level menengah dan manajer bawah.
- d. Pendekatan individual serta kemampuan kolektif yang rasional sebagai media yang berperan menyelesaikan kepuasan upaya (Mardiasmo, 2018)
- e. Berperan penting menyediakan Akuntabilitas Publik (Hantono et al., 2021).

Visi, misi, dan rencana strategis organisasi menjadi penghubung oleh anggaran kinerja berbasis prioritas dan menjadi acuan dalam merancang program. Hal ini memeriksa bahwa hasil yang dicapai secara konsisten akan setara dengan visi dan tujuan organisasi. Metrik kinerja, pedoman biaya, dan penilaian kinerja merupakan elemen-elemen dari penganggaran berbasis kinerja. Tiga alat yang tersedia untuk mengevaluasi *input*, *output*, dan hasil program untuk mendorong kinerja dengan cara yang efisien dan efektif. Alat-alat ini disesuaikan dengan tingkat kinerja (Baviga, 2021).

2. Kinerja Dalam Perspektif Islam

Interpretasi Islam tentang kinerja dapat ditemukan dalam surah Al-Qur'an berikut ini

Surah Al-Ahqaf ayat 19

لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”

Menurut ayat tersebut, mereka akan menerima ganjaran dari Allah SWT berdasarkan perbuatan mereka. Dengan kata lain, pekerjaan yang baik niscaya akan membuahkan perkerjaan yang maksimal, sama halnya jika dilakukan perkerjaan yang

berkebalikan. Jika kita menerapkan kinerja sebagai ukuran, dengan demikian seorang individu yang berkinerja baik dalam bekerja akan menguntungkan organisasi dan memberikan kinerja yang baik.

Surah An-Nahl Ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat tersebut di atas mendeskripsikan janji Allah kepada pria dan wanita yang hatinya bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, bagi mereka yang mengerjakan amal saleh, yaitu amal yang konsisten pada firman Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya. Allah telah memperlihatkan bahwa Dia akan membayar perbuatan yang diperintahkan dengan balasan yang lebih besar di akhirat daripada kehidupan yang menyenangkan di dunia. Setiap jenis kedamaian adalah bagian dari kehidupan yang bahagia.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, evaluasi ini melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh (Mujiaty & Lavita, 2019). Evaluasi kinerja organisasi mempengaruhi pemberian penghargaan, komentar yang memuaskan, promosi, penempatan kembali, atau pemberhentian, serta pemutusan hubungan kerja pada pusat pertanggungjawaban (Majid, 2019).

3. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Upaya sistem mengukur kinerja memiliki tujuan, yaitu:

- a. Berperan dalam meningkatkan dengan lebih efisien dalam media komunikasi (*top down* dan *bottom up*).
- b. Menilai tingkat sasaran keuangan dan non-keuangan menyediakan sesuai keadilan untuk melacak perkembangan pencapaian strategi.
- c. Memperhatikan kesadaran manajer tingkat menengah akan kepentingan mereka dan menginspirasi mereka untuk memenuhi *goal congruence*.
- d. Sebagai sarana untuk mencapai kepuasan melalui kombinasi logis antara upaya individu dan potensi kelompok (Hantono et al., 2021).

4. Manfaat Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja memiliki manfaat, yaitu berikut ini:

- a. Sebagai penilaian kinerja tim manajemen memberikan penjelasan yang akan dipergunakan..
- b. Kinerja yang telah ditentukan sebagai upaya menyediakan instruksi untuk memenuhi sasaran.
- c. Upaya membangun kinerja dengan melacak dan menilai sasaran target kinerja, membandingkannya dengan sasaran kinerja, dan menerapkan proses perbaikan.
- d. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan sebagai upaya menyediakan pujian dan hukuman atas prestasi yang dijalankan secara adi.
- e. Upaya membangun kinerja instansi yang berperan bagi setiap pimpinan dan bawahan demi komunikasi yang lancar
- f. Daya ukur terpenuhinya hak konsumen.
- g. Membangun sistem cara kerja organisasi pemerintah.
- h. Menjamin bahwasanya keefektifan atau tidak keberpihakan pada yang lain dalam pengambilan putusan (Mardiasmo, 2018).

5. Analisis Kinerja Keuangan

Tujuan pengujian kinerja keuangan dapat dijelaskan bahwa, demi melakukan penilaian terhadap efektivitas operasi pemerintah, mengukur kapasitasnya dalam mengumpulkan dana, menentukan posisi keuangannya, memastikan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya, dan melakukan pengujian agar pasti bahwa pemerintah telah menerapkan anggaran sesuai dengan prinsip yang berlaku. Rasio keuangan dari beberapa prosedur yang dipakai untuk menilai kinerja keuangan, seperti, analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, serta rasio efisiensi.

a. Analisis Varians Belanja

Perbedaan antara pengeluaran yang direalisasikan dan yang dianggarkan merupakan defenisi dari analisis varians pengeluaran. Analisis varians atau analisis selisih mengandung penjelasan untuk tujuan perencanaan atau perlindungan yang menunjukkan selisih anggaran tersebut dapat dikategorikan menguntungkan atau tidak menguntungkan (Rustan et al., 2019).

Penyelidikan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi dikenal sebagai analisis varians. Pembaca laporan dapat menentukan tingkat perbedaan antara

anggaran pengeluaran dan realisasinya harus disajikan dan dinyatakan dengan bentuk nilai nominal atau persentase dengan melihat laporan realisasi anggaran yang telah disediakan (Mahmudi, 2016).

Rumus berikut ini dapat digunakan untuk menentukan selisih anggaran dan realisasi:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 2. 1
Kualifikasi Pengukuran Kinerja Varians Belanja

Kualifikasi Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja \leq Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja $>$ Anggaran Belanja

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Jika temuan varians pengeluaran tidak melebihi atau sejumlah anggaran jumlah yang dianggarkan, maka studi varians belanja dapat dianggap berhasil. Lebih jauh lagi, hal ini dapat dianggap kurang baik jika pengeluaran aktual melampaui anggaran yang dialokasikan.

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari perbedaan yang mencolok dalam pengeluaran anggaran yang direalisasikan. Pertama, hal ini mengindikasikan tersedianya efisiensi anggaran. Kedua, bila selisihnya lebih kecil, mungkin ada kekurangan dalam perencanaan anggaran yang membuat estimasi pengeluaran menjadi kurang akurat. Anggaran yang tidak digunakan dapat disebabkan oleh program atau kegiatan yang diamanatkan oleh eksekutif yang tidak dilaksanakan (Mahmudi, 2016).

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Anda bisa menghitung rasio pertumbuhan untuk menentukan apakah kinerja anggaran pemerintah daerah pada tahun yang dilaporkan menunjukkan peningkatan belanja yang positif atau negatif. Rasio ini menguraikan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan pertahanan dan mengembangkan kinerjanya dari waktu ke waktu (Sartika, 2019).

Pada umumnya, kenaikan belanja berhubungan dengan perubahan pada jangkauan layanan, pergerakan nilai rupiah, penyesuaian faktor makroekonomi,

dan penyesuaian terhadap inflasi (kenaikan jumlah uang beredar atau penambahan jumlah likuiditas dalam perekonomian) (Mahmudi, 2016).

Rumus berikut ini dapat digunakan untuk menentukan nilai pertumbuhan belanja:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Realisasi belanja thn}_t - \text{Realisasi belanja thn}_{t-1}}{\text{Realisasi belanja thn}_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2

Kualifikasi Pengukuran Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kualifikasi Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: (Mahmudi, 2016)

c. Analisis Kecerassian Belanja

Menemukan keseimbangan antara belanja dapat dicapai dengan bantuan analisis keserasian belanja. Pada umumnya distribusi, alokasi, dan stabilisasi dikelompokkan dalam peran anggaran. Demi anggaran yang efisien, pemerintah daerah harus mengkoordinasikan pengeluaran mereka. Rasio ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam membelanjakan untuk proyek-proyek modal dibandingkan dengan biaya operasional. Pengaruh pelaksanaan pembangunan dan jumlah keuntungan yang dibutuhkan untuk menjamin penyediaan pertumbuhan yang direncanakan, tidak ada pedoman yang ditetapkan untuk rasio optimal belanja operasi dan modal terhadap APBD (Mahmudi, 2016). Analisis keserasian belanja terbagi dua, yaitu:

1) Analisis Belanja Operasi

Bandingkan hubungan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah disebut Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja. Pengeluaran yang memiliki manfaat yang selesai dalam satu tahun periode fiskal disebut sebagai pengeluaran operasi. Oleh karena itu, pengeluaran ini biasanya bersifat normal dan berulang, tetapi juga bersifat jangka pendek. Porsi belanja operasi

dalam jangkauan pada total belanja daerah yaitu antara 60-90% (Mahmudi, 2016). Berikut ini adalah rumus untuk rasio belanja operasi:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

2) Analisis Belanja Modal

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja memperbandingkan total belanja modal yang direalisasikan dengan total belanja daerah. Rasio ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan untuk menetapkan persentase pengeluaran yang disalurkan untuk belanja modal pada tahun anggaran yang dilaporkan. Belanja modal, yang juga merupakan pengeluaran rutin, memberikan keuntungan jangka menengah dan panjang. Biasanya, belanja modal mencapai 5-20% dari belanja daerah (Mahmudi, 2016). Berikut ini adalah formula rasio belanja modal:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

d. Rasio Efisiensi

Ukuran penghematan anggaran organisasi dinilai dengan rasio efisiensi. Data yang disajikan dari rasio efisiensi ini memiliki karakteristik relatif, bukan absolut. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada patokan untuk rasio ini yang dianggap tepat. Disimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah tahun ini lebih hemat dibandingkan tahun lalu.

Produktivitas dan efisiensi adalah konsep yang saling berhubungan erat. Memperbandingkan hubungan keduanya antara *output* yang didapatkan dan *input* yang diperlukan dipakai untuk menilai efisiensi. Saat suatu prosedur yang telah diperoleh tertentu disediakan dengan keefisienan dan pengeluaran seminimal kali, maka proses kegiatan operasional tersebut dianggap efisien (menggunakan sumber daya dengan bijak). Indikator efisiensi menjelaskan *input* sumber daya suatu unit organisasi seperti personil, gaji, dan biaya administrasi terkait dengan *output* yang dihasilkan. Berikut ini rumus rasio efisiensi, yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah kualifikasi efisiensi untuk mengevaluasi kinerja keuangan yang diperoleh dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 (Poeh et al., 2021):

Tabel 2. 3
Kualifikasi Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kualifikasi
100% ke atas	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Mendagri No.690.900.327 tahun1996

C. Laporan Keuangan Sektor Publik

Mekanisme pertanggungjawaban yang terdokumentasi atas kinerja keuangan implementasi finansial negara dan daerah selama satu periode akuntansi, anggaran merupakan defenisi dari laporan keuangan. Akuntabilitas sektor publik kebanyakan berasal dari pelaporan keuangan entitas sektor publik. Kemampuan manajemen sektor publik untuk menyampaikan informasi kepada publik, termasuk data akuntansi dalam berbagai bentuk laporan keuangan, terpengaruh oleh berkembangnya panggilan untuk diterapkannya akuntabilitas publik. Pengambilan keputusan dapat didasarkan pada analisis fakta-formasi keuangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang memperjelas mengenai pemerintahan daerah, sebagai wujud nyata dari upaya merealisasikan keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan keuangan pemerintah, menyebutkan mengenai jenis pertanggungjawaban pada pemerintah daerah (Susanti et al., 2021).

Laporan mengenai kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas diorganisasikan ke dalam laporan keuangan. Pertanggungjawaban manajer atau pemimpin dalam menerapkan anggaran ditampilkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan mencakup informasi mengenai transaksi-transaksi yang berlangsung. Memeriksa kepatuhan dari peraturan perundang-undangan dengan melakukan analisis atas keadaan keuangan, efektivitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan, membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pendanaan dengan jumlah yang dianggarkan sebagai tujuan pemakain laporan keuangan. Untuk memberikan informasi kepada para pemakai

mengenai status finansial, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat ketetapan dalam membuat alokasi sumber daya merupakan tujuan utama laporan keuangan. Secara lebih spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk mempertunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dilimpahkan kepadanya dan untuk menyampaikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, serta (Erlina, 2016):

- a. Sumber daya ekonomi, kewajiban, dan entitas dana pemerintah menyajikan data yang tercakup di dalamnya.
- b. Menyajikan rincian perolehan, distribusi, dan pemakaian sumber daya keuangan.
- c. Terhadap rencana pengeluaran menyajikan rincian tentang kepatuhan nyata.
- d. Menyediakan informasi mengenai kataatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menjelaskan bagaimana perusahaan pelapor membiayai operasinya dan memenuhi kebutuhan keuangannya.
- f. Memberikan rincian yang mencakup kapasitas pemerintah untuk mendanai pelaksanaan inisiatifnya.
- g. Menyajikan data yang dapat dipakai demi menilai kapasitas entitas pelapor dalam membiayai operasinya..

Pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No.71 Tahun 2010 memiliki tujuan, yaitu (Erlina, 2016):

- a. Memberikan data yang terinci mengenai sumber, penggunaan, dan pemakaian sumber daya keuangan.
- b. Membayar keseluruhan dengan memberikan rincian mengenai cakupan pendapatan periode berjalan.
- c. Memberikan penjelasan tentang sumber daya keuangan yang telah diperoleh oleh organisasi pelapor, serta hasil yang telah dicapai.
- d. Memberikan penjelasan tentang bagaimana entitas pelapor membiayai seluruh kegiatan operasinya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Uraikan status dan posisi keuangan entitas pelapor sehubungan beserta sumber-sumber pendapatan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk yang berawal dari penerimaan dan pemungutan pajak.

Sesuai dampak dari pelaksanaan yang digunakan selama waktu pelaporan dalam menyajikan data mengenai kenaikan dan penurunan dana keuangan organisasi pelaporan.

Secara garis besar dari PP no.71 Tahun 2010 tentang SAP tentang elemen laporan keuangan pokok yang wajib, yaitu:

- a. pelaksanaan Anggaran (*Budgetary Report*)
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2) Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- b. Laporan Finansial (*Financial Report*)
 - 1) Neraca
 - 2) Laporan operasional (LO)
 - 3) Laporan perubahan ekuitas
 - 4) Laporan arus kas
- c. Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) (Majid, 2019).

Pengakuan kewajiban seseorang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui media pertanggungjawaban secara periodik untuk mempertanggungjawabkan pencapaian atau tidak tercapainya misi organisasi dalam melaksanakan dikenal dengan istilah akuntabilitas (Sari & Nurlaila, 2022). Suatu pedoman dalam melaksanakan prinsip keterbukaan proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi adalah defenisi dari Transparansi (Zahra et al., 2023).

Masalah keterbatasan tenaga akuntansi dan kurangnya pengetahuan tentang patokan akuntansi pemerintahan ditunjukkan beserta buruknya laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Hal ini berdampak buruk pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu syarat laporan keuangan yang harus dipenuhi (Rosanti & Triyanto, 2023).

1. **Laporan Realisasi Anggaran**

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) harus disertakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Hernandi et al., 2022). Ringkasan sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan pemerintah disajikan dalam laporan ini, bersama dengan perbandingan dalam satu periode akuntansi antara anggaran dan realisasi belanja.

Laporan Realisasi Anggaran, menurut Kementerian Keuangan (2018) dapat dijelaskan sebagai laporan yang membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi pendapatan dan belanja. Laporan realisasi anggaran merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah yang mencakup realisasi dan anggaran, berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan di atas beserta pengeluaran yang telah melewati perbandingan selama waktu yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan, standar Laporan Realisasi Anggaran menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyajikan laporan tersebut (Lubis & Dewi, 2022). Elemen-elemen keuangan, surplus/defisit, pendapatan, beban, dan transfer yang diharuskan untuk penyajian yang wajar, semuanya disertakan dalam penyampaian LRA. Beberapa kelebihan laporan realisasi anggaran mencakup hal-hal dibawah ini: (Rosanti & Triyanto, 2023)

- a. Realisasi pendapatan, beban, transfer, surplus, defisit, dan pembiayaan suatu organisasi pelaporan dirinci dalam laporan realisasi anggaran dalam kaitannya dengan realisasi pembiayaan entitas pelaporan. Dalam membuat penilaian atas akuntabilitas, alokasi sumber daya keuangan, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran, para pengguna laporan dapat mendapatkan manfaat dengan mengetahui informasi total realisasi anggaran. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah juga dapat dievaluasi dengan memanfaatkan informasi ini.
- b. Untuk mengestimasi sumber daya keuangan yang akan diperlukan untuk menopang aktivitas operasional pemerintah di masa depan, laporan realisasi anggaran diselenggarakan. Informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran entitas pelaporan inilah yang menjadi kegunaan dari pelaporan realisasi anggaran. Tingkat pemenuhan tujuan yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat ditunjukkan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

D. Kajian Terdahulu

Pengukuran kinerja finansial melalui analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan dihasilkan topik dari sebahagian riset yang telah dijalankan oleh akademisi sebelumnya.

Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Peni Indah Sari (2019)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara	Temuan menunjukkan bahwa berdasarkan keserasian belanja, kinerja anggaran belanja modal dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pembangunan. Anggaran belanja modal berjalan dengan baik, terlihat dari pertumbuhan belanja modal. Anggaran belanja modal tidak melebihi realisasinya dari tahun 2014 hingga 2017, dan berdasarkan rasio efisiensi kinerjanya, kinerja anggaran belanja modal dinilai baik.	Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada evaluasi kinerja, sedangkan penelitian ini berfokus kepada analisis efektifitas. Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif. Hanya menganalisis anggaran belanja modal, sedangkan saya menambahkan operasi.
2.	Tri Marlina Naully (2019)	Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada	Temuan menunjukkan bahwa analisis varians belanja untuk tahun fiskal 2014 hingga 2018 menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap belanja operasi menunjukkan adanya peningkatan belanja	Penelitian sebelumnya lebih mengutamakan pada analisis varians dan efisiensi kinerja, Meskipun, penelitian ini menambahkan

		<p>Sekretarian DPRD Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>daerah dan rasio belanja operasi. Analisis terhadap rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mengindikasikan penurunan rasio belanja modal, sementara analisis terhadap efisiensi belanja daerah mengindikasikan peningkatan rasio belanja modal, dan belanja modal diklasifikasikan sebagai belanja yang sangat efisien.</p>	<p>analisis analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja. Metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif. Lokasi penelitian.</p>
3.	Heriadi (2019)	<p>Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Disperkimtan Provinsi Sul-Sel</p>	<p>Temuan ini membuktikan bahwa anggaran dan pelaksanaan anggaran belanja 2015-2017 diukur efektivitasnya dengan menggunakan pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Perhitungan ini mendukung pernyataan bahwa kinerja keuangan sudah efektif, dengan temuan di 2015 mencapai 96,74% dan tahun 2017 sejumlah 95,68%. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi</p>	<p>Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada efektifitas, sedangkan temuan ini menambahkan analisis varians, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja. Metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Lokasi penelitian.</p>

			Sulawesi Selatan mendapatkan kinerja keuangan yang sangat baik pada tahun 2016, yaitu sebesar 88,12%.	
4.	Nadra Suhaila Lubis (2021)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara	Temuan menunjukkan bahwa berdasarkan analisis varians belanja menunjukkan bahwa dikatakan cukup baik. Dari hasil analisis pertumbuhan belanja menghasilkan bahwa positif dari adanya pertumbuhan pengeluaran. Dari studi analisis keserasian belanja menjelaskan bahwa pemakaian anggaran belanja yang semakin lebih tinggi pemakaian untuk belanja operasi dibanding belanja modal. Dan dari rasio efisiensi realisasi anggaran dapat diuraikan cukup efisien.	Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada evaluasi kinerja, sedangkan penelitian ini berfokus kepada analisis efektifitas. Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif. Objek penelitian.
5.	Gheatama Ramadhani (2022)	Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja Untuk Menilai Efektivitas	Temuan menunjukkan bahwa berdasarkan analisis efektivitas jangkauan efektivitas dapat dikatakan cukup efektif penggunaan anggaran belanja pada	Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada evaluasi kinerja, sedangkan temuan ini mengutamakan kepada analisis

		<p>Efisiensi Kinerja Keuangan Dan Pencatatan Keuangan Anggaran Belanja Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020</p>	<p>Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020, disebabkan rata-rata rasio efektivitas belanja yang dihasilkan tiap tahunnya di atas 85%. Hasil analisis efisiensi belanja tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja langsung diuraikan sangat efisien, karena rata-rata rasio efisiensi belanja yang dicapai dalam tiap periodenya di bawah 70%.</p>	<p>efektifitas. penelitian ini menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi. Objek penelitian.</p>
6.	Lince Liling (2022)	<p>Analisis Anggaran dan Realisasi untuk menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Desa Makkodo Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja</p>	<p>Menurut temuan penelitian, rasio efektivitas rata-rata perhitungan anggaran pada tahun 2019-2021. Rasio ini adalah 99%. Hal ini dapat dianggap efisien berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi dari anggaran. Efisiensi rata-rata 76% dalam menangani anggaran keuangan, bersama dengan penghematan pengeluaran dan penurunan efisiensi, menunjukkan bahwa peningkatan kinerja telah</p>	<p>Analisis ini sebelumnya lebih mengutamakan pada analisis efektivitas dan efisiensi kinerja, meskipun, analisis ini menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi. Metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif.</p>

			dicapai, sehingga mendapatkan gelar sistem yang efisien.	
7.	Gurhanawan (2022)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Penilaian terhadap Kinerja Keuangan pada Kantor Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat	Temuan tersebut menggambarkan bahwa kinerja keuangan Inspektorat Pembantu Wilayah Jakarta Barat telah membaik dan dianggap cukup baik untuk tahun 2020-2022. Melalui pemeriksaan analisis varians belanja, inspektorat dapat mengurangi biaya. Pada tahun 2022, inspektorat bertujuan untuk meningkatkan standar ekonominya mencapai tingkat ekonomis. Hal ini menunjukkan upaya yang patut dipuji dan kinerja yang tinggi. Terakhir, rasio ini juga menguraikan kinerja keuangan yang kuat.	Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis varians dan analisis rasio belanja, sedangkan penelitian ini menambahkan analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja operasi dan belanja modal. Lokasi riset.
8.	Dwi Alfallah Hermendi, Shaladin Dwi Risma Deviyant,	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	Temuan dari penelitian ini menghasilkan biaya perolehan yang berubah ubah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015	Metode analisis data penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis varian, analisis

	Wulan Iyhg Ratna Sari, (2022)	Daerah pada Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarna, n, Vol. 7 No. 2	sampai dengan 2018. Pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu 5,89%. Efektivitas dapat dikatakan sangat efektif. Analisis rasio efisiensi belanja dapat dikatakan efisien. Hal ini dikarenakan Pemerintah mampu memanfaatkan melakukan hemat pada laporannya serta rata-rata efisiensi 90,97%.	pertumbuhan, dan rasio efektivitas, sedangkan penelitian ini menambahkan analisis keserasian belanja. Metode pengumpulan data. Lokasi penelitian.
9.	Bilqis Nabilah dan Nadi Hernadi Moorcy (2022)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Periode 2019–2021 Pemerintah Kota Balikpapan, Jurnal Media Riset Ekonomi, Vol. 2 No. 2	Temuan tersebut menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup efektif untuk kualifikasi efektivitas Pemerintah Kota Balikpapan periode 2019-2021. Berwujudkan kualifikasi efisiensi, tingkat efisiensi untuk periode 2019-2020 cukup efektif, namun pada tahun 2021 memperoleh tingkat yang turun. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengarahkan kinerjanya dalam hal penyerapan anggaran untuk waktu 2019-2021, tetapi masih ada sebahagian beberapa	Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis efektivitas, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi. Metode yang digunakan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian.

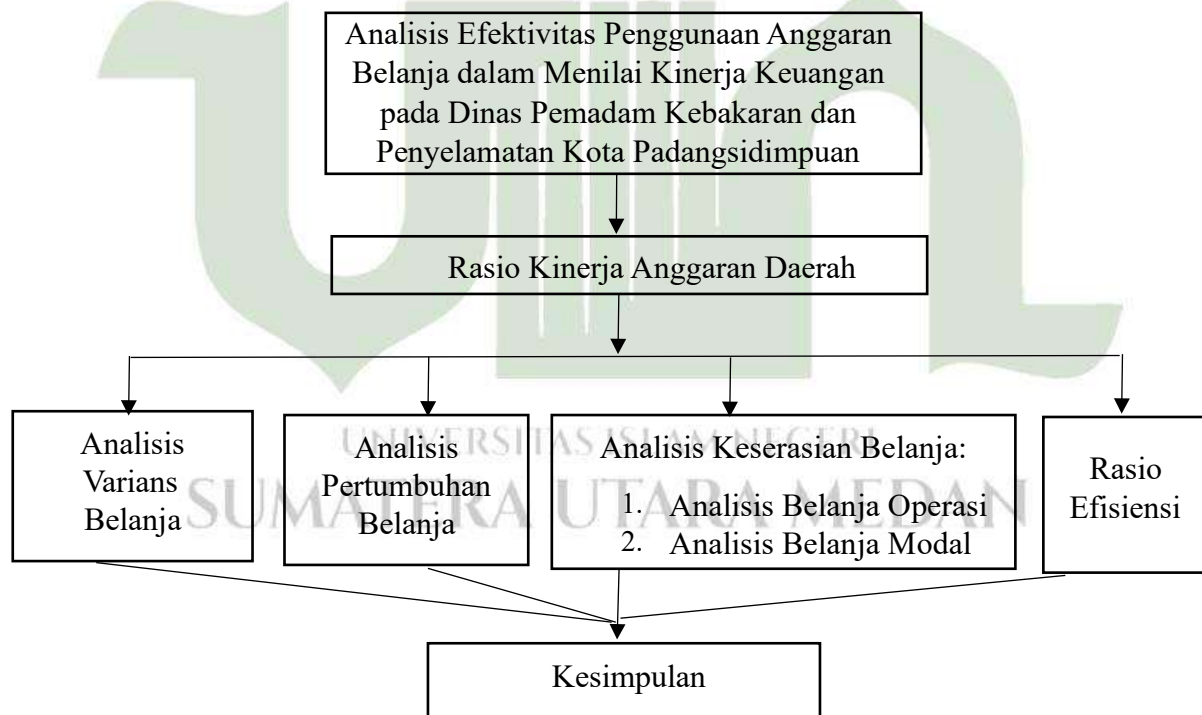
			belanja yang belum terealisasi secara baik karena adanya penyesuaian dengan kebijakan dan kebutuhan pada periode berjalan.	
10.	Raden Mas Rachmanin Ditya Dwifarchan dan Umi Sulistiyanti (2023)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kabupaten Magelang)	Hasil temuan menunjukkan bahwa BPPKAD Kab. Magelang terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran selama periode lima tahun 2017-2021 adalah baik dan efektif. Singkatnya, anggaran belanja BPPKAD Kab. Magelang dapat dijalankan secara maksimal dan lebih dekat pada sasaran yang ingin dicapai. Anggaran tersebut telah menunjukkan hasil yang positif, khususnya memenuhi kriteria efisiensi rata-rata, dengan rasio efisiensi rata-rata sebesar 47%.	Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis efektivitas dan efisiensi, sedangkan analisa ini memakai analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi. Metode yang dipergunakan memakai metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian.

E. Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran yang digunakan untuk melakukan penelitian Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan, berdasarkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya.

Para perencanaan manajerial menggunakan anggaran untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara finansial. Pemakaian anggaran yang disajikan dalam format laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang akan diperiksa. Menganalisis rasio kinerja anggaran daerah, termasuk analisis varians belanja untuk menentukan tingkat realisasi anggaran, kita dapat menilai kinerja anggaran belanja daerah. Apakah melampaui anggaran atau tidak. Menganalisis pertumbuhan belanja untuk mengetahui apakah meningkat atau menurun, analisis keserasian belanja untuk menentukan seberapa besar keseimbangan belanja organisasi dengan memakai rasio belanja operasi dan belanja modal dan analisis efisiensi sebagai penetapan menentukan penghasilan tertinggi beserta penghematan instansi dalam memakai anggaran. Dari temuan ini, kita dapat menyimpulkan informasi mengenai pengukuran instansi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan dan juga kinerja instansi tersebut.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran